

**KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)**



**Disusun Oleh:**

**HAFSHAH MUHARDIANA**  
**NIM. 10625003889**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**



## ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul **“Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari Ekonomi Islam”**.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli dari potensi suatu daerah. Salah satu sumber dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah oleh karena itu perlu digali potensi yang ada di daerah tersebut. Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi pajak daerah salah satunya adalah pajak sarang burung. Usaha sarang burung dengan menangkap burung untuk diambil sarangnya, burung yang dibudidayakan adalah burung walet dan sriti. Potensi dari pajak sarang burung ini cukup besar tapi bagaimana sistem penerimaan sarang burung tersebut sebenarnya. Potensi penerimaan pajak sarang yang begitu besar apakah mampu digali dengan maksimal atau malah terhambat oleh kendala-kendala yang sulit dipecahkan. Tujuan dari penelitian ini bagi pemerintah daerah adalah untuk memberi masukan bagaimana meningkatkan penerimaan pajak sarang burung yang ada sesuai dengan potensi pajak tersebut yang cukup besar dan meningkatkan kesadaran pengusaha sarang burung tentang sistem penerimaan pajak sarang burung tersebut.

Lokasi penelitian ini penulis lakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, beralamat di jalan Merdeka No.64, Selatpanjang. Telp /Fax. (0763)33151. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, apa kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap kontribusi pajak sarang burung walet yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu data diperoleh langsung dari Wakil Ketua dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Populasi dalam penelitian ini ialah petugas pemungutan pajak sarang walet Kabupaten Kepulauan Meranti Selatpanjang. Jumlah populasi sebanyak 10 petugas pemungutan pajak sarang burung walet. Adapun Metode pengambilan sampel adalah metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang bertujuan karena jumlah karyawannya tidak terbatas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan pustaka, serta menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu suatu cara untuk menganalisis data yang telah ada dan menyimpulkannya dengan mencari hal-hal yang bersifat umum, ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kontribusi pajak sarang burung dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berjalan cukup baik dan sudah sesuai dengan syariat Islam. dilihat dari petugas pemungutan pajak sarang burung walet telah bekerja sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. Akan tetapi masalah wajib pajak sarang burung kurang bekerjasama dengan petugas dan kesadaran membayar pajak yang masih rendah.

Dari hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu di perbaiki diantaranya adalah pemisahan petugas bagian penagihan maupun penetapan meskipun mempunyai kasi yang berbeda di perlukan pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha sarang burung tersebut secara rutin agar dapat memaksimalkan pajak.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**ABSTRAK**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN ASLI**

#### **DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

A. Keadaan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	13
B. Perkembangan Usaha Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	17
C. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	22

D. Struktur Organisasi, Uraian Jabatan, Jumlah dan Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	24
E. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	30
F. Jenis-jenis Pendapatan yang dihimpun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	31

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Pajak, Fungsi, Jenis, dan Sarang Burung Walet .....	33
B. Pengertian Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah .....	39
C. Tinjauan Pajak Dalam Islam .....	41
D. Subjek dan Objek Pajak Sarang Burung Walet .....	46
E. Dasar Pengenaan, Tarif, Masa, dan Saat Tethutang Pajak Sarang Burung Walet .....	46
F. Wilayah Pemungutan, Perhitungan, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet .....	48
G. Surat Pemberitahuan, penetapan, dan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet .....	50

**BAB IV KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	53
B. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	73
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah .....	75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran-Saran .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan, saat ini sedang menerapkan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya untuk memajukan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.<sup>1</sup>

Agar daerah dapat menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, perlu sumber keuangan daerah. Semakin besar keuangan daerah, maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap penyelenggaraan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan, kesejahteraan, serta pelayanan umum kepada masyarakat.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*



Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

UU NO 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam pasal 157 menyebutkan tentang sumber-sumber Pendapatan Daerah meliputi<sup>3</sup>:

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin sedikit ketergantungan Daerah terhadap bantuan pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti : pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Dari hasil penerimaan pajak burung sarang walet oleh pemerintah digunakan untuk membiayai keperluan daerah, baik dari segi pembangunan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan daerah itu

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2002. h. 39

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*

sendiri. Supaya perkembangan daerah menjadi maju, dengan ini daerah harus memiliki keunggulan yang dapat diandalkan.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat adalah dari Pajak Daerah. pajak daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat di handalkan bagi daerah.<sup>4</sup>

Menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, SH bahwa, *Pajak adalah :Iuran Rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang ( yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum*<sup>5</sup>

Selanjutnya bagaimana pula pendapat para ulama mengenai Pajak.

Yusuf Qardhawi berpendapat :

*Pajak adalah : kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus di setorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa dapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin di capai oleh negara.*<sup>6</sup>

Gazi Inayah berpendapat :

*Pajak adalah : kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai denga kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.*<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Marohot P. Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah* .Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005. h. 1

<sup>5</sup> Rocmat Soemitro, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2008. h.12.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*, Jakarta:PT. Pustaka Litera Antarnusa. 1999 h. 24.

<sup>7</sup> Gazi Inayah, *Teori Konferhensif tentang zakat dan pajak*. Yogyakarta: Tiara wacana. 2003. h. 9.

Prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur yaitu :

1. Harus ada nash (al-quran dan al-hadits) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non-muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemashalatan umum<sup>8</sup>

Pajak Sarang Burung Walet juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Mengingat banyak terdapatnya rumah sarang burung walet yang disediakan oleh pengusaha burung walet khususnya di Selatpanjang yang dalam hal ini memiliki potensi.

Sarang Burung Walet bertujuan untuk menjaga dan melindungi kelestarian sarang burung walet baik dihabitat alami maupun dihabitat buatan dari bahaya kepunahan, serta untuk meningkatkan produksi dalam upaya pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat.

Sebelum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kabupaten yang baru mekar, sebelumnya di bawah kekuasaan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pajak Sarang Burung Walet juga berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya yaitu dengan di berlakukannya Peraturan Daerah

---

<sup>8</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007. h. 33.

Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

*Burung Walet adalah : satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga Collocalia. Pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet merupakan upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami maupun di habitat buatan.*<sup>9</sup>

Masa pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan 3 bulan sekali waktunya mulai masa panen sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%(sepuluh persen) dari nilai pasaran sarang burung walet. Pemungutan pajak sarang burung walet dipungut langsung oleh petugasnya.

Setelah pemekaran menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti, pajak sarang burung walet juga menjadi andalan Pemerintah Daerah memberikan kontribusinya untuk Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) mengingat terdapat rumah-rumah pengusahaan Sarang burung walet oleh pengusaha yang di jadikan sebagai Wajib Pajak daerah.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas Penulis menfokuskan Penelitian tentang  
**“KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM  
 MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
 KEPULAUAN MERANTI DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

<sup>10</sup> Sutardi, Wawancara, Tanggal 02 Juli 2010

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penulisan ini penulis membahas kontribusi pajak sarang burung walet daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari Ekonomi Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- a. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti?
- b. Apa kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
- c. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kontribusi Pajak Sarang Burung walet yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah?

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui kontribusi pajak sarang burung walet dalam upaya peningkatan penerimaan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap kontribusi pajak sarang burung walet yang dilaksanakan oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## **2. Manfaat Penelitian**

Bagi Mahasiswa :

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet khususnya daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Mengetahui Pandangan Ekonomi Islam terhadap kontribusi pajak sarang burung walet yang di terapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam bidang Ekonomi Islam yang siap terjun di dunia kerja.
- d. Meningkatkan kreativitas mahasiswa untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif melalui Penelitian ini.
- e. Membina mental dan kedisiplinan dalam dunia kerja.

Bagi Instansi Pemerintah :

- a. Sebagai sarana untuk mempereratkan hubungan yang positif antara dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan lembaga pendidikan Universitas Islam Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk menyiapkan kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai bidangnya

- c. Dengan pelaksanaan penelitian ini di tuntut sumbangsih pemikiran atau masukan dari mahasiswa untuk penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kerja pada Dispenda.
- d. Dari hasil penelitian nanti akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet kedepan agar lebih baik lagi.
- e. Sebagai naskah akademis sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan daerah mengenai pajak sarang burung walet.

Bagi Lembaga Pendidikan :

- a. Mempereratkan hubungan yang positif antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan lembaga pendidikan Universitas Islam Negeri Pekanbaru.
- b. Dengan penelitian ini akan menjadi sarana sosialisasi eksistensi Program studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, adapun tempat lokasi penelitian penulis pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Jl. Merdeka Selatpanjang, dikarenakan dekat dengan tempat penulisan dan dapat menghemat biaya penelitian.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai Subjek penelitian adalah Petugas Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Selatpanjang.
- b. Sebagai Objek penelitian ini adalah Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

## 3. Populasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah petugas pemungutan pajak sarang burung walet Kabupaten Kepulauan Meranti Selatpanjang. Jumlah populasi diketahui 10 petugas pemungutan pajak sarang burung walet maka penelitian ini mengambil sampel sebanyak 10 petugas pemungutan pajak sarang burung walet menggunakan teknik *perposive sampling* (Sampel bertujuan).

## 4. Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis juga akan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari tinjauan pustaka yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :



### 1. Metode Wawancara

Dengan cara melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian baik secara lisan atau tertulis pada pihak yang terkait.

### 2. Observasi

Penulis langsung terjun ke lapangan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan penelitian baik objek maupun subjek penelitian.

### 3. Daftar Dokumentasi

Yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian misalnya, Sejarah Singkat, Struktur Organisasi, Uraian dan jabatan, Profil Dispenda, dan lain-lain.

### 4. Tinjauan pustaka

Yaitu menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

### 6. Metode Analisa

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada kemudian data tersebut dikelompokkan dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.
- b. Metode kuantitatif, yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan mengedit kedalam tabel sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

## 7. Metode Penulisan

- a. Induktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan, kemudian dianalisa sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Pada bab ini terdiri dari keadaan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Struktur Organisasi, Uraian Jabatan, Jumlah dan Keadaan Pegawai, Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti, Jenis-Jenis pendapatan yang dihimpun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian pajak, Fungsi, Jenis, dan Sarang Burung Walet, Pengertian kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, Tinjauan pajak dalam Islam, subjek dan objek pajak, Dasar pengenaan dan Tarif, Masa, dan Saat Terhutang Pajak, Wilayah Pemungutan, Perhitungan, Tata Cara Perhitungan Pajak, Surat pemberitahuan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak.

### **BAB IV : KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

Terdiri dari Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, Apa kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kontribusi pajak sarang burung walet yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis memberikan saran yang sifatnya membangun.

Dalam bab ini juga penulis menyimpulkan hasil penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

#### **A. Keadaan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti**

##### **1. Kondisi Demografis**

Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti yang disahkan pada 16 Januari 2009 cakupan wilayahnya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, dan Kecamatan Merbau.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas Wilayah  $\pm 3.707,84 \text{ km}^2$  dengan rincian Kecamatan Tebing Tinggi 84.950 hektare, Kecamatan Tebing Tinggi Barat 54.733 hektare, Kecamatan Rangsang 68.050 hektare, Kecamatan Rangsang Barat 24.160 hektare, dan Kecamatan Merbau 134.891 hektare.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Padang dan Selat Malaka
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Pinang Masak
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Panjang dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Panjang dan Selat Bengkalis

Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 68 (enam puluh delapan) desa dan 5 (lima) kelurahan. Seiring dengan pe[  
13]rgan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kedepan

bukan tidak mungkin akan terbentuk kecamatan baru di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Upaya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan masyarakat.

## 2. Kondisi Demografis

Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari lima kecamatan memiliki luas dan kepadatan penduduk yang berbeda. Kecamatan Merbau merupakan kecamatan yang terluas (36,78%), sedangkan Kecamatan Rangsang Barat yang terkecil (6, 59%).

Sementara itu, Kecamatan Tebing Tinggi merupakan kecamatan dengan penduduk terbesar (39,63%), dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat memiliki jumlah penduduk yang terkecil (7,45%). Selengkapnya lihat table.

**Tabel II. 1**  
**Luas wilayah dan penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010**

No	Kecamatan	Luas (hektare)	(%)	Penduduk	(%)
1	Tebing tinggi	84.950	23,16	85.742	39,63
2	Tebing Tinggi Barat	54.733	14,92	16.113	7,45
3	Rangsang	68.050	18,55	31.060	14,36
4	Rangsang Barat	24.160	6,59	34.370	15,89
5	Merbau	134.891	36,78	49.044	22,67
	<b>Jumlah</b>	<b>336.784</b>	<b>100</b>	<b>216.329</b>	<b>100</b>

*Sumber: Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti (diolah)*

Faktor demografis menjadi dasar pertimbangan memberdayakan ekonomi masyarakat serta pembangunan infrastruktur sehingga ruang dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Keterbatasan sarana dan prasana mengakibatkan produktivitas masyarakat rendah yang bermuara pada kemiskinan.

Kemiskinan menunjukan telah terjadi kesenjangan sumberdaya yang dapat diakses masyarakat dan keterbatasan sarana dan prasarana maupun ketersediaan tenaga kerja diwilayah tersebut.

**Tabel II. 2**  
**Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga (RT), dan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010**

No	Kecamatan	RT	RTM	Persentase RTM (%)
1	Tebing tinggi	17.745	4.953	27,91
2	Tebing Tinggi Barat	3.585	1.598	44,57
3	Rangsang	6.729	2.843	42,25
4	Rangsang Barat	6.608	2.307	34,91
5	Merbau	10.897	4.175	38,31
	<b>Jumlah</b>	<b>45.564</b>	<b>15.876</b>	<b>34,84</b>

*Sumber: Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti (diolah)*

Berdasarkan data diatas, kantong kemiskinan terbesar berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan tingkat kemiskinan 44,57% diatas rata-rat angka persentase RTM Kabupaten Kepulauan Meranti (34,84).

### 3. Aspek Pendidikan

**Tabel II. 3**  
**Kondisi Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010**

No	Tingkat Pendidikan	Persentase	keterangan
1	Tidak ada ijazah	41,78	Tidak Tamat SD
2	Tamat SD/MI	24,65	-

3	Tamat SLTP	14,22	-
4	Tamat SMU	15,48	-
5	D1 & D3	1,93	-
6	D4 & S1	0,76	-
7	S2 & S3	0,23	-

*Sumber: Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti (diolah)*

Berdasarkan data diatas terlihat pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu mendapat perhatian serius. Hal ini mengingat persentase penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang tamat SD/MI dan tidak ada ijazah (termasuk yang tidak bersekolah) masih sangat tinggi yaitu sebesar 66,43%.

#### **4. Aspek Keuangan Daerah**

Kita menyadari sepenuhnya kondisi keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam bentuk pendapatan dan penerimaan daerah, masuk dalam kategori daerah yang APBD nya tergolong sedang artinya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Sumber penerimaan keuangan daerah kita sebagian besar berasal dari dana perimbangan dari pemerintah pusat, dari data yang kami miliki sumber penerimaan keuangan daerah untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 571,2 Milyar terdiri dari:

- a. Bagi hasil dari sumber daya alam Rp. 332 Milyar
- b. Bagi hasil dari penerimaan pajak Rp. 137 Milyar
- c. Dana penyeimbang seblum dana alokasi umum Rp. 69 Milyar
- d. Dana Alokasi Khusus Rp. 8.3 Milyar
- e. Dana hibah dari Kabupaten Bengkalis Rp. 16.5 Milyar
- f. Dana hibah dan pembangunan dari Pemerintah Propinsi Riau Rp. 8,4 Milyar

Dari data tersebut di atas dapat digambarkan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tahun-tahun mendatang harus berupaya kita tingkatkan. Salah satu jalan yang harus kita tempuh adalah kemampuan melobi dengan pemerintah pusat, kita yakin dana DAK dan DAU masih bisa kita tingkatkan. Optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah juga harus kita laksanakan tentu dengan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Disamping itu juga kita akan berupaya untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah secara seimbang antara belanja pemerintah dan belanja publik agar benar-benar tercipta anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

## **B. Perkembangan Usaha Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Sudah menjadi tabiat manusia, bahwa ia selalu ingin mencoba dan merasakan sesuatu yang baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jika masa dahulu burung walet hanya hidup dan bersarang didalam gua serta hutan-hutan belantara, kini burung walet dapat kita jumpai pada bangunan-bangunan bertingkat yang secara khusus disediakan manusia sebagai tempat tinggal walet. Hal ini bermula pada seorang China yang tinggal di Hongkong.

Pada tahun 1970-an walet ini hanya dilakukan oleh kaum China yang berasal dari Hongkong sebagai hobi belaka, karena perasaan sukanya terhadap suara kicauan burung walet, kemudian orang China ini membangun rumah walet sebagai tempat persinggahan bersarang dan bertelurnya saja disamping untuk mendengar suaranya. Akan tetapi setelah beberapa tahun lamanya, makin ramai burung walet yang datang untuk bersarang dan bertelur dirumah buatan itu, bahkan mencapai ribuan ekor jumlahnya. Melihat keadaan yang demikian maka orang China tersebut merasa tertarik hati untuk merombak dan membuat lebih besar lagi rumah tempat bersarang burung walet.

---

<sup>1</sup> Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti



Dengan maraknya penangkaran walet di Hongkong serta giatnya para usahawan untuk mencari dan membeli sarang walet, membuat golongan etnis China dari berbagai negara merasa tertarik untuk membuka usaha penangkaran sarang walet ini.

Usaha penangkaran sarang burung walet akhirnya melingkar diberbagai negara di Dunia, dan sampai pula kenegara jiran tetangga Malaysia, penangkaran walet berkembang bagaikan jamur dinegara ini. Negara Johor, Selangor dan Malaka merupakan daerah pengolah sarang walet terbesar di Malaysia, sehingga daerah ini merupakan tempat berkumpulnya pengusaha walet. Usaha ini ternyata membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, melihat kesuksesan yang diraih dari pengusaha Malaysia menjadi para usahawan dinegara indonesia khususnya Teonghoa beralih profesi dari usaha lain menjadi penangkaran sarang walet.

Kemudian dikeluarkan pengaturan terhadap perindustrian sumber daya alam serta menggali pendapatan asli daerah, perlu diatur tentang izin Pengelolaan dan pengusaha sarang walet di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 06 Tahun 2002, dan mengenai pajak sarang burung walet yang diatur dalam peraturan daerah No. 08 Tahun 2002.

Usaha penangkaran burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat banyak dijumpai. Dilihat perkembangan usaha walet akan memberikan peluang ekonomi yang sangat maju dimasa mendatang sehingga bermunculan bangunan-bangunan tinggi sebagai tempat menangkarkan walet didaerah lain di kota selatpanjang.

Kota selatpanjang ini banyak sekali bangunan sarang burung walet, keberadaan rumah toko (Ruko) bagi”penangkaran” untuk habitat burung walet di Kota Selatpanjang kian hari kian bertambah, keberadaan rumah walet ini selain menambah padatnya pembangunan di pusat kota

juga menghiasi perwajahan Kota Selatpanjang yang identik dengan perairan, jadi tak hayal pula keberadaannya menjadi perwakilan pembangunan daerah kota sagu yang dijuluki Tanah Jantan itu jika kita memasuki wilayah kota Selatpanjang dari kejauhan sudah terlihat berdiri tegak ratusan bangunan penangkaran burung walet di pesisiran selat air hitam.

Pemandangan ruko walet ini juga melihatkan pembangunan ditengah-tengah kota Selatpanjang terus berkembang. Bila ada penangkaran walet tentu bunyi-bunyian yang menjadi pemikat”penarik” burung laut ini juga turut mewarnai kesibukan kota sagu tersebut. Usaha walet kerap dicendrung dengan hasil usaha yang tidak main-main untungnya, mengapa tidak, perkilonya mencapai harga puluhan juta rupiah. Memang bukan usaha tergolong kecil yang tentunya pemilik dari walet ini terkategori pengusaha kaya dari etnis Tionghoa dari berbagai daerah.

Sejak tahun 80-an rumah walet itu sudah banyak berdiri di Selatpanjang. Pada awal keberadaannya, bunyi kaset pemikat burung walet itu sangat mengganggu masyarakat namun karena keberadaannya semakin hari semakin banyak, malah menjadi hal yang biasa saja dan seolah-olah keberadaannya sudah suatu yang lumrah di kota ini.

Dengan keberadaan ratusan rumah walet ini seharusnya mendapatkan penghasilan bagi daerah ini. Karena dari sektor pajak dari hasil tersebut terhitung lumayan, jika hal ini dapat di tarik pajaknya, saya kira akan mendapatkan nilai tambah dari sektor pajak daerah kepulauan Meranti, saya berharap juga pemerintah daerah bersama DPRD untuk secepatnya menetapkan perda terkait retribusi pajak walet tersebut.

Penangkatan walet di Kota Selatpanjang saat ini bertumbuh sangat pesat diseluruh kota. Hal tersebut memang memberikan keuntungan signifikan terutama secara ekonomi yang cukup besar bagi warga masyarakat kota Selatpanjang.

**Tabel II. 4**  
**Perkembangan Harga Sarang Burung Walet Tahun 1998-2008**

No	Tahun	Kisaran Harga (Rp/ kg)
1	1998-2000	18-20 Juta
2	2001-2002	15-20 Juta
3	2003-2004	13-18 Juta
4	2005-2006	10-12 Juta
5	2007-2008	11-13 Juta

*Sumber: Diolah dari berbagai sumber*

**Tabel II. 5**  
**Daftar nama-nama pegusaha walet yang telah mendapat izin Bupati**

No	No. KOHIR	Nama Wajib Pajak / Wajib Retribusi	Alamat Lokasi	NPWPD
1	PR1. 0011	PPSB Walet'' Thony''	Jl. A. Yani No. 102	4.005421.07.02
2	PR1. 0066	PPSB Walet'' Kok Tjen''	Jl. Bihun No. 28	4.0005248.07.02
3	PR1. 0056	PPSB Walet'' Tek Seng''	Jl. Belut No. 87	4.0006766.07.01
3	PR1. 0048	PPSB Walet'' Hong Ping''	Jl. Belanak No. 36	4.0005345.07.02
5	PR1. 0047	PPSB Walet'' Lim Tji Gie''	Jl. Banglas	4.0006983.07.03
6	PR1. 0075	PPSB Walet'' A. Le''	Jl. D.I. Panjaitan	4.0005348.07.02
7	PR1. 0083	PPSB Walet'' Tjun Kiat''	Jl. Diponegoro	4.0005281.07.01

*Sumber Data: Dipenda Kabupaten Kepulauan Meranti 2010*

Dari tabel diatas terdapat daftar nama-nama pengusaha walet yang sudah mendapat izin oleh Bupati. Dari hasil pendataan masih banyak yang belum mendapat izin dan masih banyak yang belum membayar pajak. Dikarenakan kurangnya pengawasan yang ketat terhadap dinas

pendapatan daerah kepada pengusaha walet. Kemudian kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Dari hasil penelitian dilapangan ternyata pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 382 pengusaha sarang burung walet yang sudah mendapat izin dari Bupati, yang terealisasi 332 pengusaha sarang burung walet, 50 pengusaha sarang burung walet yang belum mendapat izin dari Bupati.

### **C. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Otonomi daerah telah memberikan semangat baru bagi daerah untuk bergeliat membangun dan menggali potensi daerahnya. Sebagai hasil perjuangan pergerakan reformasi sudah seharusnya otonomi daerah mampu menjawab tuntutan dan harapan dari reformasi. Tujuan dan harapan utama gerakan reformasi tidak lain adalah peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dari berbagai segi kehidupan. Untuk itu sudah menjadi suatu konsekuensi bagi otonomi daerah untuk mampu mensejahterakan masyarakat dengan berbagai potensi dan kewenangan yang dimiliki dalam mengelola sumber potensi daerah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Suatu hal yang bisa dibantah, Kabupaten Kepulauan Meranti telah di anugrahi Allah SWT sebagai daerah yang secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis. Posisinya yang strategis ini menyebabkan Selatpanjang yang sekarang menjadi Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti telah dikenal sejak lama baik sebagai kota transit, maupun sebagai kota perdagangan dan jasa.

Untuk melaksanakan program-program kerja yang telah disusun serta menunjang pencapaian tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka kehadiran organisasi atau instansi mutlak diperlukan.

Demikian pula dengan rangkai program pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang memerlukan subsidi/ dukungan biaya atau dana yang sangat besar. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah haruslah memiliki instansi atau lembaga yang mewadahi kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara khusus adalah Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan dan penerimaan daerah yang dipimpin langsung oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan dasar hukum pelaksanaan tugasnya adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang peraturan daerah.

Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terletak di Jln Merdeka No. 64 di atas tanah seluas 8.240 m<sup>2</sup> . Dinas Pendapatan Daerah ini sangat memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah guna mendukung kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk operasional selanjutnya diberikan landasan hukum yang berlaku yaitu perda No.02 Tahun 2009 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

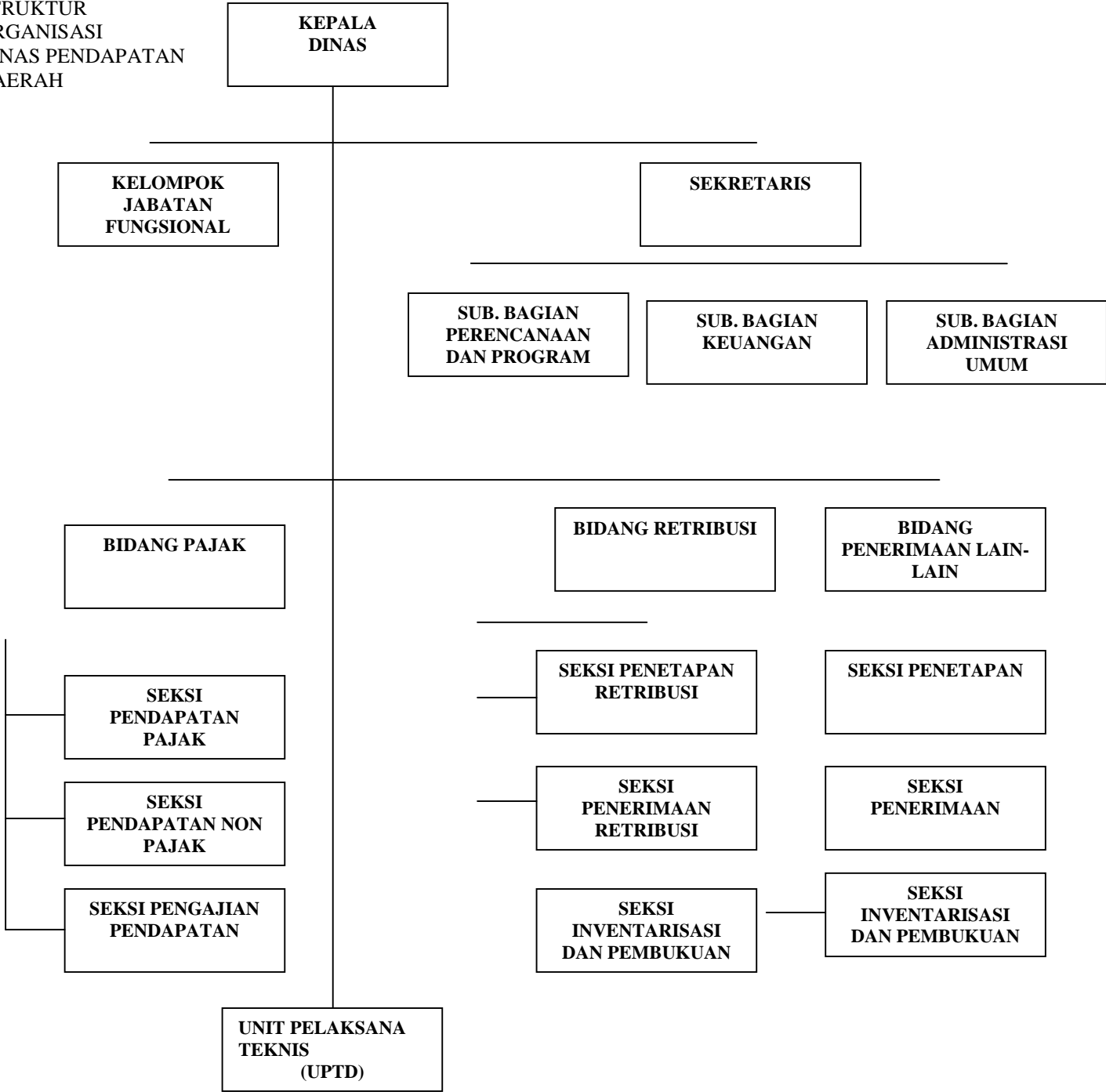
#### **D. Struktur Organisasi, Uraian Jabatan, Jumlah dan Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dalam kegiatan suatu instansi diperlukan adanya suatu struktur dan jalur koordinasi antara anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang telah digariskan terlebih dahulu. Struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif dan efesien. Suatu struktur yang efektif adalah bila struktur organisasi tersebut memungkinkan sumbangan dari tiap-tiap individu dalam mencapai sasaran organisasi. Selain itu organisasi bukan sekedar untuk menunjukkan bentuk

atau tipe organisasi, melainkan perwujudan hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab orang-orang yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tersebut.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

STRUKTUR  
ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN  
DAERAH



## Uraian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti:

### 1. Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Memimpin kegiatan Dinas.
- b. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bagian, sub dinas, unit pelaksanaan teknik dinas dan kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan dinas dalam bidang tatausahaan dinas, perencanaan, program, pajak, retribusi, serta pengendalian PBB dan BPHTB, dan pendapatan lain-lain.
- d. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah tersebut.
- e. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan Bupati.
- f. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.
- g. Membina dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja.
- h. Memberi informasi, saran dan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kepada Bupati.
- i. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2. Bagian Tata Usaha Dinas mempunyai tugas menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola



administrasi kepegawaian, melaksanakan administrasi perlengkapan dan perawatan serta menata usahakan kegiatan lainnya.

3. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun program kerja dan rencana kegiatan sub dinas pendataan dan penetapan, menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan penetapan, membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur kerja, prosedur pelayanan, menyiapkan dan menyusun konsep pendataan dan penetapan, mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyusunan rencana target Pendapatan Daerah, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangkaian intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.
4. Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas menyusun program kerja sub dinas penagihan, menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja pelayanan penagihan, membuat daftar realisasi penerimaan atas dasar laporan-laporan berkala yang terima bank tempat pembayaran pajak/ retribusi daerah dan semua pendapatan daerah lainnya, membuat program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan, membuat pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan pemungutan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain, menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis sub dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain, membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur kerja dan prosedur pelayanan,

mengkoordinir, memantau dan melaksanakan koordinasi dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja dilingkungan dinas pendapatan daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

6. Sub Dinas Pendapatan Pajak dan Non Pajak mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja sub dinas pendapatan pajak dan non pajak, menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis sub dinas pendapatan pajak dan non pajak, membuat rencana dan melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan prosedur kerja dan prosedur pelayanan, pemantauan dan koordinasi atas realisasi penerimaan pajak dan non pajak, mengumpulkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dalam hal peningkatan pendapatan dan penerimaan daerah.

Jumlah dan Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti:

**a. Jumlah Pegawai**

Jumlah Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 29 orang pegawai yang terdiri dari pegawai negeri dan pegawai honorer untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II. 6**  
**Jumlah Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Komposisi	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	27 Orang	93,10
2	Pegawai Honorer	2 Orang	6,90
	Jumlah Pegawai	29 Orang	100,00

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat pegawai negeri sipil yang berjumlah 27 orang dan dibantu oleh pegawai honorer sebanyak 2 orang. Hal ini dimaksud untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam hal pemberian pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal pelayanan atas pemungutan pajak demi tercapainya peningkatan sumber pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **b. Tingkat Pendidikan**

Faktor pendidikan pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang mengemban fungsi sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah itu berimplikasi lebih lanjut terhadap pangkat dan golongannya. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 7**  
**Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana S1	1	3,44
2	Sarjana S2	15	51,72
3	Sarjana D3	8	27,58
4	Tamatan SLTA	3	10,34
5	Tamatan SLTP	1	3,44
6	Tamatan SD	1	3,44

	Jumlah	29	100,00
--	--------	----	--------

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*

#### **E. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

1. Mewujudkan Pendapatan Asli Daerah primadona pembangunan daerah.
2. Objek dan Subjek Pajak/ Retribusi memiliki kemampuan dan potensi sumber-sumber pendapatan lainnya.
3. Dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

1. Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan ditingkatkan Kualitasnya.
2. Aksi Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah secara merata.
3. Gunakan dan sempurnakan SISDUR Pendapatan Daerah.
4. Usahakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi pengawasan dan instansi lainnya.

#### **F. Jenis-Jenis Pendapatan Yang Dihimpun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Ada pun jenis pendapatan yang dihimpun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari:

1. Hasil Pajak Daerah, yaitu:
  - a. Pajak Hotel dan Restoran
  - b. Pajak Hasil Penangkapan ikan
  - c. Pajak Tontonan/ Hiburan
  - d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Burung Walet

g. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Barang Galian Golongan C

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan Dinas Pendapatan Daerah disediakan dari anggaran pendapatan belanja daerah dan subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat dan lembaga lain dari pemerintah daerah yang sah.

Pada uraian sebelumnya dikemukakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah itu sendiri 4 golongan besar yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah menurut perundang-undangan. Setiap golongan tersebut meliputi beberapa komponen, walaupun begitu menurut kenyataannya tidaklah semua komponen tersebut dapat dikelola setiap pemerintah daerah. Ini disebabkan oleh kemampuan daerah yang juga terbatas oleh keadaan atau potensi daerah yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga keterbatasan jenis penerimaan atau sumber pendapatan yang ada pada daerah tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dipenda Kabupaten Kepulauan Meranti

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pajak, Fungsi, Jenis, dan Sarang Burung Walet**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pajak itu adalah punggutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari barang yang yang perdagangkan.<sup>1</sup>

Secara umum, pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan.<sup>2</sup>

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan definisi pajak menurut para ahli di antaranya:

1. Dr. Wahab al-Zuhailly mengatakan pajak adalah suatu istilah yang dipakai guna menunjukkan jenis punggutan yang diambil oleh pemerintah (penguasa) dari rakyatnya, baik berupa punggutan dari pemilikan atas tanah, pengelolaan tanah, atau pun sumber-sumber lainnya.<sup>3</sup>
2. Prof. Dr. MJH Smets mendefenisikan pajak itu ialah prestasi pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum yang dapat di paksakan, tanpa adanya kontrak prestasi

---

978 <sup>1</sup> Badudu, Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet. Ke-1, h.

<sup>2</sup> Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992), h. 1

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatun*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), Jus. V, h. 532

yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>4</sup>

3. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, (Guru Besar pada Universitas Pelajaran Bandung) dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapat,” mendefenisikan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>5</sup>
4. Prof. Dr. PJA Andriani mendefenisikan pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintah.<sup>6</sup>

Dari beberapa jenis definisi yang dikemukakan para ahli diatas, dapat di ketahui bahwa unsur pajak mencakup:

- a. Pungutan oleh pemerintah
- b. Berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum
- c. Pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak

---

<sup>4</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-2, h. 19-20

<sup>5</sup> Sudarsono, *Aturan Bea Materai dan Kebijaksanaan Pajak*, (Jakarta: PT. Rineca Cipta, 1994), Cet. Ke-1,

<sup>6</sup> Bohari, *Op. cit*, h. 19

- d. Pelaksanaannya bila perlu dapat dipaksakan artinya: hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa atau sita
- e. Hasilnya digunakan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang tujuannya untuk keperluan masyarakat.

## **2. Fungsi Pajak**

Pada dasarnya dua fungsi pemungutan pajak yaitu:

- a. Fungsi bugetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dimana pembangunan hanya cukup tersedia didalam kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara.
- b. Fungsi Regulerend (fungsi mengatur) yaitu pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi misalnya:

- 1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.<sup>7</sup>

## **3. Jenis Pajak**

Pajak biasa dilihat dari segi golongan, sifat, dan lembaga pemungutan pajak dibagi kepada:

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003), Cet. Ke-5, h. 1



Menurut Golongannya:

- a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penambahan nilai.

Sementara itu, dari segi sifatnya, pajak dibagi pula menjadi:

- a. Pajak subjektif merupakan pajak yang atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Sedangkan menurut lembaga pemungutnya dibagi kepada:

- a. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.
- b. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membayai rumah tangga daerah pajak daerah dibedakan atas dua yaitu pajak yang dipungut oleh propinsi misalnya pajak kendaraan bermotor, kendaraan diatas air, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu pajak yang dipungut oleh

oleh kabupaten/ kota misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.<sup>8</sup>

#### **4. Sarang Burung Walet**

Sedangkan pajak sarang burung walet dalam perda No. 8 Tahun 2002 BAB I pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak burung walet yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas produksi sarang burung walet.
- b. Sarang burung walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat bersarang dan bertelur serta menetasakan anak burung walet.
- c. Burung walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam warga Collocalio.

Pajak daerah dalam perda No. 8 Tahun 2002 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi, masyarakat dituntut kesadarannya untuk membayar kepada badan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memungut pajak dari masyarakat yang wajib pajak, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Jadi, jelaslah bawah pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar masyarakat khususnya wajib pajak yang terkait atas jasa yang diberikan pemerintah yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 5-6

sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pajak sarang burung walet yang diberlakukan kepada setiap usaha sarang burung walet.<sup>9</sup>

Dikalangan para ahli perpajakan banyak memberi pengertian tentang pajak, namun maksud dan tujuannya tetap sama seperti yang dinyatakan oleh:

Pengertian pajak menurut Soemitro (2002:129) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pendapatan diatas terdapat ciri-ciri mendasar tentang pajak sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau Peraturan Hukum lainnya.
- b. Pajak dipungut tanpa adanya kontraprestasi
- c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan sisanya digunakan sebagai investasi
- d. Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara (budgeter) juga berfungsi sebagai pengatur (regulair).

Didalam rancangan struktur pajak yang baik adalah bagaimana prinsip-prinsip pajak yang bertujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat walaupun

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2002 *Tentang Pajak Sarang Burung Walet*

ini bukan sebagai fakta pengendali utama akan tetapi pemerataan secara umum diatur oleh Undang-Undang tentang pajak.<sup>10</sup>

## **B. Pengertian Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi (T Guritno 1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.<sup>11</sup>

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

<sup>10</sup> Rahmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak pendapatan*, (Jakarta: Grafindo. 2003), hal.

<sup>11</sup> T. Guritno, *Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, 1992, hal. 76

Dari bunyi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 daerah dituntut untuk dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri, untuk itu dituntut kemampuan daerah dalam usaha untuk meningkatkan Pendapatan daerah, guna membiayai pengeluaran-pengeluaran kebutuhan daerah.

Dapat diketahui bahwa pajak daerah menempati tempat pertama dari Pendapatan Asli Daerah karena itu sistem pemungutannya perlu ditingkatkan dan disempurnakan dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam usahanya, sehingga pendapatan daerah dapat menutupi kebutuhan rutin daerah dan membiayai pengeluaran dari kebutuhan pembagian di daerah itu.

Pengertian peningkatan adalah suatu upaya untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya.<sup>12</sup>

### **C. Tinjauan Pajak Dalam Islam**

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, pendanaan itu penting artinya, karena tanpa adanya dana yang cukup maka pembangunan yang akan di rencanakan sulit untuk direalisasikan. Untuk membiayai pembangunan daerah dapat dilakukan melalui penggalan potensi daerah itu sendiri guna membiayai pembangunan. Salah satu sumber potensi daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui penerimaan pajak sarang burung walet, karena pajak sarang burung walet ini merupakan salah satu pajak asli daerah untuk mendapat peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam era otonomi daerah APBD sebagai dokumen rencana kegiatan dan pembiayaan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan

---

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Pendapatan Asli Daerah*

keaktifitas pemerintah daerah keaktifitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong daerah untuk mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber keuangan.

Pendapatan Asli Daerah, Selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah Surat At-Taubah Ayat 41 yang berbunyi:

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan masih ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.  
(QS At-Taubah Ayat: 41)

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

Artinya: ”dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.  
(QS Al-Baqarah Ayat: 195)

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

Artinya:

Dalam ayat tersebut di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan.

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak yaitu:

Yusuf Qardhawi berpendapat:

*Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>13</sup>*

Gazi Inayah berpendapat:

*Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.<sup>14</sup>*

Sedangkan Abdul Qadim Zallum berpendapat:

*Pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.<sup>15</sup>*

Definisi yang diberikan oleh Yusuf Qardhawi dan Gazi Inayah, masih terkesan sekular, karena belum ada unsur-unsur syar'iah. Dua definisi tersebut hampir sama dengan definisi pajak menurut tokoh-tokoh pajak non-Islam.

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1999. hlm. 24

<sup>14</sup> Gazi Inayah, *Teori Konferhensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003. hlm. 9

<sup>15</sup> Abdul Qadim Zalun, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, Boogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002. hlm.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zulum terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya adalah harta (al-mal)
- c. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk non- Muslim
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

1. Harus ada nash (al-quran dan al-hadits) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non-muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemashalatan umum.

Dengan definisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/ kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan



untuk kepentingan mereka(kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak menurut Syariat Islam:

1. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontiniu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
2. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
3. Pajak hanya diambil dari kaum Muslim untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim.
4. Pajak hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.
5. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak dapat dihapuskan bila sudah tidak diperlukan.

Penjelasan mengenai pajak dalam Islam yang tertuang dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:



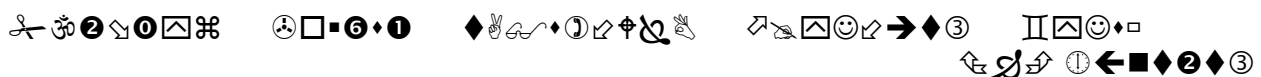


Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan Al kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. ( At- Taubah Ayat: 29)

Yang dimaksud dengan Jizyah adalah : Pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan, bagi jaminan keamanan diri mereka.

Kaum Muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Swt (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, tentunya tidak termasuk Ibadah.

Demikian pula bagi petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai jihad baginya. Sebab, sekecil apa pun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt dan mendapat balasan yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah Ayat: 7 yang berbunyi:



Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.<sup>16</sup>

#### **D. Subjek dan Objek Pajak Sarang Burung Walet**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak daerah. Objek pajak adalah sesuatu yang menyebabkan timbulnya pajak dan digunakan sebagai acuan besarnya tarif pajak yang harus dibayar.

---

<sup>16</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007. h. 33.

Subjek dan objek Pajak sarang burung walet menurut peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No.08 Tahun 2002 BAB II Pasal 2 dan 3 adalah sebagai berikut:

1. Dengan nama pajak dipungut atas setiap pengambilan sarang burung walet.
2. Objek pajak adalah setiap penyelenggaraan pengambilan sarang burung walet.
3. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau tidak sengaja karena keadaan tertentu memiliki atau menguasai sarang burung walet.
4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan sarang burung walet.

#### **E. Dasar Pengenaan, Tarif, Masa, dan Saat Terhutang Pajak Sarang Burung Walet**

Dasar pengenaan dan tarif pajak sarang burung walet menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam perda No. 8 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan adalah nilai jual sarang burung walet.
2. Tarif pajak ditetapkan berdasarkan status tanah/ bangunan milik perorangan/ badan tempat pemeliharaan sarang burung walet dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengambilan diatas dan dibawah tanah/ bangunan milik perorangan/ badan usaha dikenakan tarif 10% dari hasil brutto (kotor) setiap kali pengambilan.
  - b. Pengambilan pajak ditentukan setiap kali panen.

Tetapi harus diingat bahwa untuk terkoordinirnya penerimaan pajak burung walet ini sangat diperlukan suatu organisasi yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Kepulauan Meranti karena diketahui aktivitas yang dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya organisasi. Organisasi menurut sufian (1995: 108) adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan.

Masa dan saat terhutang pajak sarang burung walet menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 8 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Masa pajak adalah waktu mulai panen sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet.<sup>17</sup>

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Saat pajak terhutang terjadi pada saat terjadinya peristiwa atau perbuatan yang memenuhi syarat pajak terhutang yang ditentukan dalam peraturan daerah tentang suatu pajak daerah.

Untuk mengetahui dengan jelas kapan saat terhutang suatu jenis pajak daerah yang dipungut pada suatu daerah, harus dilihat dengan jelas ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. Pajak terhutang harus dibayar oleh wajib pajak.<sup>18</sup>

Besarnya pokok pajak sarang burung walet yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak sarang burung walet adalah sesuai dengan rumus berikut:

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2002 *Tentang Pajak Sarang Burung Walet*

<sup>18</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h.

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Sarang Burung Walet}\end{aligned}$$

## **F. Wilayah Pemungutan, Perhitungan, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet**

Wilayah pemungutan dan perhitungan pajak sarang burung walet menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No.08 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pengambilan sarang burung walet
- b. Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual sarang burung walet dan dikalikan dengan berat hasil panen sarang burung walet.<sup>19</sup>

Dasar perhitungan sarang burung walet menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 07 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut:

1. Perhitung pajak berdasarkan nilai jual hasil pengambilan sarang burung walet.
2. Nilai jual sebagaimana tersebut diatas dihitung dengan mengalikan Volume pengambilan dengan harga standar.
3. Harga standar sarang burung walet ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sarang burung sriti Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kilogram.
  - b. Sarang burung walet Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, *loc.cit.*

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 07 Tahun 2006 *Tentang Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet*

Setiap pengusaha sarang burung walet wajib menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak sarang burung walet yang terhutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak sarang burung walet pada dasarnya merupakan sistem *Self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah, yang menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

#### **G. Surat Pemberitahuan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet**

Surat Pemberitahuan (STP) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Fungsi Surat Pemberitahuan (STP) bagi wajib pajak adalah:

- a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak
- b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan)
- d. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan)
- e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah (PPN dan PPnBm)., bagi pengusaha kena pajak.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sony Devano, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, h. 150

Surat Pemberitahuan dan penetapan pajak sarang burung walet menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 7 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- b. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak
- c. SPTPD harus disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- d. Bentuk isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan kepala daerah.<sup>22</sup>

Penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak terutang tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Pajak sarang burung walet terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah.

Pajak yang terutang dalam Perda No.08 tahun 2002 adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Misalnya selambat-lambatnya perpajakan daerah, 15 bulan berikutnya dari masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak sarang burung walet diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka pajak sarang burung walet harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tahun diterbitkan.

---

<sup>22</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 07 Tahun 2006 *Tentang Retribusi Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.*

Pembayaran pajak sarang burung walet yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh kepala daerah. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Angsuran pembayaran pajak sarang burung walet harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 81.



## **BAB IV**

# **KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

### **A. Pelaksanaan Pemungutan pajak sarang walet di Kabupaten Kepulauan Meranti.**

#### **1. Konsep Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Sistem Pemungutan Pajak mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpinan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pajak sarang burung walet adalah suatu sumber pendapatan daerah dimana pajak sarang burung walet termasuk salah satu penerimaan daerah yang potensial yang penerimaannya dapat dijadikan dana pembangunan daerah. Oleh karena itu penanganannya harus serius sehingga penerimaan dari pajak burung walet tersebut betul-betul dapat meningkatkan dan dapat dijadikan sebagai sumber dana dalam pembangunan dan pelaksanaan roda pemerintahan.

Ada beberapa problematika pajak yang dihadapi dinas pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Ekonomi Islam.

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

Wajib pajak tidak mau membayar pajak, dengan alasan kurangnya keuntungan yang didapatinya. Padahal pajak itu sendiri penting dari penerimaan pajak dapat untuk pembangunan daerah dan untuk kepentingan umum. akan tetapi masyarakat kurang menyadari hal itu.

2. Tidak ada kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak

Wajib pajak tidak jujur dalam pembayaran, seharusnya pendapatan pajak setiap tahunnya meningkat. agar tidak terjadi penipuan makanya subjek dan objek pajak harus jujur.

3. Dalam penagihan

Apabila petugas menagihkan pajak ketempat penangkaran walet, wajib pajak selalu memberi alasan yang tidak wajar. Katanya usahanya kurang menguntungkan, kemudian wajib pajak selalu menutup tempat penangkaran walet tersebut. dengan alasan wajib pajak tidak ada.<sup>1</sup>

Pajak burung walet berkembang sesuai dengan perkembangan daerah tersebut namun kenyataannya penerimaan pajak burung walet selalu mengalami penurunan dan realisasi penerimaannya kurang dari target yang ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Dipenda dalam penerimaan pajak burung walet. Karena tanpa adanya ketentuan tersebut maka penerimaan tidak akan meningkat.

---

<sup>1</sup> Ade Saputra, *Wawancara*, Tanggal 14 Oktober 2010

Konsep pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.08 Tahun 2002 tentang pajak sarang burung walet, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.06 Tahun 2002 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, karena Kabupaten Kepulauan Meranti belum mempunyai Peraturan Daerah pajak sarang burung walet dan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPRD Kepulauan Meranti.

Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 100 Tahun 2010 tentang memeberlakukan secara *mutatis mutandis* Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Pajak Daerah diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti (Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 40, 42, 43, 44, 45 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 08 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 04 Tahun 2009).

Bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan tugas pokoknya membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang pendapatan daerah, maka tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 menegaskan sebelum pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati maka semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bengkalis tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti, maka perlu diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten bengkalis tentang Pajak Daerah.

Diberlakukan secara *mutasi mutandis* Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 40, 42, 43, 44, 45 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 08 Tahun 2002, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 04 Tahun 2009. Sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo undang-undang 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
5. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
6. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

7. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1980 tentang sistem dan prosedur perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-182 Tahun 2010 tentang perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau.
11. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2009 tentang pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2009 Nomor 02).
12. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2009 Nomor 03).<sup>2</sup>

Konsep pelaksanaan pajak sarang burung walet Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.08 Tahun 2002 Tentang Pajak Sarang

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Burung Walet. Dengan Persetujuan DPRD Bengkalis dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti
- d. Pejabat Daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- f. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
- g. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- h. Pajak burung walet yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas produksi pajak sarang burung walet.
- i. Sarang burung walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat bersarang dan bertelur serta menetasakan anak burung walet.

- j. Habitat buatan (Ex-situ) burung walet adalah bangunan sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak.
- k. Pemanfaatan burung walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet.
- l. Burung walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam Warga Collocalio.
- m. Pengelolaan burung walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat dan populasi alami maupun habitat buatan.
- n. Habitat alami (In-situ) burung walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kuasa hutan maupun diluar kuasa hutan.
- o. Pengusahaan burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet di habitat alaminya.
- p. Subjek pajak adalah orang atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
- q. Objek pajak adalah barang atau jasa dan sesuatu yang dikenakan pajak
- r. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- s. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- t. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- u. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- v. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
- w. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- x. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.<sup>3</sup>

Menurut Adi Wijaya, penangkar sarang burung walet ini tidaklah semudah apa yang dipikirkan, seperti halnya dengan hanya mendirikan bangunan, burung walet langsung bersarang dan mendapatkan keuntungan yang besar, ternyata hal ini tidak sama sekali, karena dalam satu tahun sampai dengan dua tahun para pengusaha walet belum mendapatkan hasil atau keuntungan

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2002 *Tentang Pajak Sarang Burung Walet*



apapun dari apa yang telah diusahakannya. karena dalam tempo waktu tersebut burung walet hanya keluar masuk saja kedalam rumah buatan, bukan langsung membuat sarang akan tetapi burung walet pada tahap ini hanya sekedar meninjau, yakni menentukan apakah rumah penangkaran tersebut cocok sebagai tempat bersarang walet atau tidak. Menurutny lagi, burungwalet ini baru mulai menghasilkan sarang setelah mereka menetap lebih kurang lima tahun lamanya didalam rumah penangkaran tersebut. Maka setelah lima sampai dengan enam tahun inilah usaha penangkaran walet baru akan menampakkan hasilnya dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi para pengusaha penangkar walet.<sup>4</sup>

Dari data yang penulis terima pada asosiasi pengusaha walet Kabupaten Kepulauan Meranti dijelaskan bahwa, jenis burung walet yang paling banyak dipelihara atau di tangkar di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni dari jenis sarang rumahan, karena sarang walet rumahan ini diproduksi dari hasil merumahkan walet. Ada beberapa jenis sarang rumahan yang bernilai jual di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni sarang putih, sarang seriti atau sarang rumput, sarang merah, sarang kuning, dan sarang hitam.

Tujuan Asosiasi Pengusaha walet Kabupaten Kepulauan Meranti:

- a. Menghimpun pengusaha atau penangkar walet dalam Kabupaten Kepulauan Meranti didalam satu wadah asosiasi.
- b. Membina dan mengembangkan kemampuan dan kegiatan serta mendorong kerjasama sesama pengusaha atau penangkaran walet agar menjadi sehat dan kuat.
- c. Berperan serta dalam pembangunan Daerah
- d. Membantu pemerintah mewujudkan tertib bangunan
- e. Membina hubungan yang baik dan serasi dengan masyarakat atau instansi pemerintah.

---

<sup>4</sup> Adi Wijaya, Pengusaha Penangkar Sarang Walet, *Wawancara*, 10 Juni 2010

- f. Memberi penyuluhan bimbingan bantuan dan memperjuangkan kepentingan anggota.

Fungsi Asosiasi Pengusaha Walet Kabupaten Kepulauan Meranti:

- a. Mempersatukan, menyerahkan dan mengarahkan kemampuan berusaha serta kegiatan anggota untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota
- c. Menyebarluaskan informasi dan penyelenggaraan komunikasi serta konsultasi antar anggota, antara anggota dan pemerintah.

## 2. Pelaksanaan pajak Sarang Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti

### a. Waktu Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet

Waktu pemanenan walet ditentukan oleh tujuan yang diinginkan dari sarang walet tersebut. Frekuensi pemanenan walet dalam setahun dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Pemanenan tiga bulan sekali dilakukan oleh para pemilik rumah walet. Hal ini karena waktu tiga bulan merupakan waktu yang tepat saat walet membuat sarang baru. Jika sarang-sarang yang sudah selesai tidak dipanen, sarang-sarang tersebut akan digunakan lagi oleh walet untuk berkembang biak.

Sarang walet dapat diambil atau dipanen jika keadaannya sudah memungkinkan untuk dipetik. Hal ini dikaitkan dengan beberapa faktor yaitu: musim, keadaan walet, kualitas sarang walet.

Pemanenan sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan semakin ramai pengusaha walet yang telah resmi mendapat izin dari pemerintah maka semakin meningkat pula jumlah panen sarang walet yang dapat dihimpun oleh tim asosiasi.

Untuk saat ini tujuan ekspor sarang walet di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni tertuju kepada negara jiran tetangga Malaysia, Singapura dan Taiwan, bahkan tak jarang pula pengusaha dari Hongkong menawarkan diri untuk membeli sarang walet di Selatpanjang.

#### b. Penangkaran Pajak Sarang Burung Walet

Khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti meskipun para penangkar walet belum memahami benar mengenai seluk beluk walet, akan tetapi dengan maraknya usaha penangkaran walet maka para usahawan khususnya warga keturunan yang berdomisili di Selatpanjang menjadi ikut-ikutan pula untuk membuka usaha penangkaran sarang walet. Sejauh ini sejak mulai dikembangkan bisnis penangkaran sarang walet di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 1990, pada tahun 2002 pemerintah mulai memberikan tanggapan yang serius terhadap pengusahaan walet. Hal ini dikarenakan pemerintah sendiri memandang dan menimbang bahwa dalam masyarakat kita saat ini telah berkembang suatu aktifitas pengusaha sarang burung walet yang perlu adanya pengaturan terhadap perindustrian sumber daya alam serta menggali pendapatan asli daerah, bahwa untuk memahami maksud diatas, perlu diatur tentang izin pengelolaan dan pengusaha sarang walet di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan peraturan daerah.

Besarnya pajak sarang burung walet ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Pada pasal 75 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen dimana tarifnya ditetapkan dengan

perda. Cara perhitungannya, besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

c. Siapa Pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pelaksanaan pemungutan pajak sarang walet dipugut langsung oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang telah ditugaskan untuk memungut pajak sarang burung walet sebanyak 10 orang petugas dari pihak Dinas Pendapatan Daerah.

Petugas tersebut langsung terjun kelapangan memugutan pajak sarang burung walet ketempatan daerah penangkaran walet yang mendapat izin dan yang sudah terdata. Biasanya pungutan pajak terjadi apabila sudah sampai masa panen sarang burung walet yaitu 3 bulan.

Setiap 1 bulan sekali terjadilah pembersihan sarang burung walet pada saat itulah dikenakan pajak.

d. Perhitungan Sarang Burung Walet

Perhitungan populasi walet bisa dilakukan dengan menghitung jumlah sarangnya. Jika terdapat 100 sarang dalam gedung walet maka jumlah walet yang menghuni gedung tersebut sekitar 400 ekor walet. Asumsi perhitungan ini adalah 100 sarang dibangun oleh 100 pasang walet yang terdiri dari 100 walet betina dan 100 walet jantan. Dengan demikian, terdapat 200 ekor walet dewasa. Selain walet dewasa, terdapat walet muda yang belum bersarang di gedung itu. Perkiraan jumlah minimalnya adalah 50% dari jumlah burung, yaitu 200 ekor walet muda. Dengan demikian, jumlah keseluruhannya sekitar 400 ekor walet.

Jika gedung walet tersebut sudah berumur lebih dari lima tahun maka perhitungan itu harus mengikuti perkiraan terdapatnya burung walet tua yang sudah tidak produktif lagi atau sudah tidak bisa lagi membuat sarang. Jika dalam sebuah gedung terdapat 500 sarang walet maka

perkiraan jumlah burung sekitar 2.000 ekor walet. Cara perhitungannya adalah jumlah walet dewasa 1.000 ekor, walet muda 500 ekor dan walet tua 500 ekor.

Tingkat kesalahan perhitungan acak ini cukup besar, terutama memperkirakan jumlah walet muda dan walet tua. Teknik perhitungan ini biasanya hanya dilakukan oleh pemilik gedung atau pengelola yang memiliki wewenang masuk ke dalam gedung untuk menghitung sarang walet.

**Tabel IV. 10**  
**Daftar Harga Sarang Walet/Kg**  
**Patokan Asosiasi Pengusaha Walet**  
**Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Jenis Sarang	Harga / Kg
1	Sarang Putih (Kualitas Super)	Rp 10.000.000,00
2	Sarang Kuning (Kualitas no. 2)	Rp 8.500.000,00
3	Sarang Hitam (Kualitas no.3)	Rp 5.000.000,00
4	Sarang Sriti	Rp 1.750.000,00

*Sumber Data: Patokan Harga Sarang Walet Ketetapan Asosiasi Pengusaha Walet Kabupaten Kepulauan Meranti*

Cara perhitungan:

Tarif pajak x Dasar pengenaan

Tarif pajak : 10%

Dasar pengenaan : Nilai jual sarang burung walet

Seorang pengusaha sarang burung walet pada suatu gedung (budidaya) mengambil dan menjual sarang burung walet, yang terdiri dari jenis walet putih sebanyak 2 kilogram dan jenis sriti 3 kilogram.

Untuk perhitungan besarnya pajak sebagai berikut:

a. Cara menghitung besarnya pajak untuk jenis walet:

Pajak terutang = tarif pajak x nilai jual

Tarif pajak = 10%

Nilai jual = volume x harga dasar

Harga standar = Rp. 10.000.000,00/ kg

Pajak = 10% x (2 kg x Rp. 10.000.000,00/ kg)

$$10\% \times 20.000.000,00 = \text{Rp. } 2.000.000,00$$

b. Cara menghitung besarnya pajak untuk jenis sriti:

Pajak terutang = tarif pajak x nilai jual

Tarif pajak = 10%

Nilai jual = volume x harga dasar

Harga standar = Rp. 1.750.000,00/ kg

Pajak = 10% x (3 kg x Rp. 1.750.000,00/ kg)

$$10\% \times 5.250.000,00 = \text{Rp. } 525.000,00$$

Jumlah pajak yang harus dibayar adalah sebesar :

$$\text{Rp. } 2.000.000,00 + \text{Rp. } 525.000,00 = \text{Rp. } 2.525.000,00$$

Dalam hal ini untuk sarang merah tidak ditentukan harganya karena sangat langka dan jarang ditemukan di Selatpanjang, akan tetapi memiliki nilai jual sangat tinggi yakni mencapai Rp 35.000.000,00 bahkan bisa lebih perkilogramnya. sedangkan sarang seriti (sarang rumput) tidak laku dijual sama sekali di Selatpanjang, hal ini karena tidak ada pengusaha yang

menginginkannya. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa harga sarang walet tergantung pada mutu atau kualitas jenis sarang.

e. Tidak membayar Pajak Sarang Burung Walet

Apabila wajib pajak sarang burung walet tidak membayar pajak, maka wajib pajak diberi surat teguran dari pihak yang berwajib. Bila terjadi keterlambatan dalam membayar pajak ini maka akan diberi sanksi yaitu denda kemudian kepala dinas pendapatan daerah melakukan penetapan pajak yang terutang, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

f. Hasil-Hasil Pajak Sarang Burung Walet

Hasil penerimaan pajak sarang burung walet merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten/ kota. Khusus pajak sarang burung walet yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak sarang burung walet. Hasil penerimaan pajak sarang burung walet tersebut diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah daerah Kabupaten yang bersangkutan. Bagi desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antar desa.

g. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak sarang burung walet, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten/ kota. Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk pembangunan daerah.

Dalam bab pembahasan ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pihak Dipenda Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang didasarkan atas sistematika, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan sehingga terjalin kerjasama yang baik melalui sektor penerima pajak.

#### 1. Melakukan bimbingan pembinaan terhadap wajib pajak burung walet

Pelaksanaan yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pihak Dipenda melakukan bimbingan pembinaan yang merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, karena melalui bimbingan dan pembinaan inilah objek pajak akan menyadari pentingnya pajak burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### 2. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak burung walet

Dalam upaya meningkatkan pemungutan hasil pajak burung walet, maka pendaftaran dan pendataan merupakan langkah-langkah yang harus diperhatikan, karena dari sekian banyak subjek dan objek pajak burung walet dapat diakumulasikan melalui data-data.

Dari pendataan bisa terlihat mana pengusaha yang sudah mendapat izin dan mana yang belum. Karena langkah melalui pendataan suatu yang sangat efektif dalam meningkatkan pemungutan hasil pajak walet.

**Tabel IV. 11**

**Target dan Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti 2009-2010**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2009	68.591.825	52. 720.420	76,47
2	2010	274.367.300	210.881.680	76,64



*Sumber Data: Dipenda Kabupaten Kepulauan Meranti 2010*

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan yaitu tahun 2009 terealisasi sebesar 76,47 % mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 76,64% .

### 3. Melakukan pembukuan dan pelaporan hasil pembuatan pajak burung walet

Dalam Melakukan pembukuan dan pelaporan sebagai mana dinyatakan terdahulu, bahwa apabila kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap subjek dan objek pajak burung walet telah dilakukan, maka pihak Dipenda harus benar-benar melakukan pembukuan dan pelaporan tentang hasil dalam pemungutan atau penerimaan pajak burung walet, kegiatan ini dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan penerimaan dilapangan.

### 4. Melakukan pengawasan terhadap penagihan pajak burung walet

Usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak burung walet adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap tugas yang dilakukan dalam penerimaan pajak. untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka pengawasan sangat penting dan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan yang telah dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan dan untuk mengetahui kesalahan atau kegagalan serta mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang terjadi, sehingga hasil dari pengawasan diharapkan akan mencerminkan ketertiban dalam setiap proses kegiatan.

Sebelum melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan pajak burung walet harus ditentukan terlebih dahulu apa yang harus di jadikan standar/ program kerja sehingga dengan adanya standar ini diharapkan pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun yang menjadi standar/ program kerja dari pada pelaksanaan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Objek yang menjadi sasaran didalam penerimaan pajak
- b. Jumlah wajib pajak (yang terdaftar)
- c. Besarnya pajak yang dikenakan pada masing-masing jenis pajak
- d. Petugas yang melakukan penerimaan pajak.

#### 5. Melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah

Kegiatan penyuluhan merupakan program kerja dilapangan yang ditujukan terhadap wajib pajak burung walet, dalam rangka menyadarkan tentang arti pentingnya pajak burung walet dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, untuk terwujudnya harapan yang diinginkan haruslah dilakukan penyuluhan-penyuluhan oleh pihak Dipenda.

Namun pada kenyataannya upaya pihak Dipenda dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak burung walet kurang ditanggapi oleh wajib pajak karena masih banyak wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam membayar pajak, serta masih terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak.<sup>5</sup>

### **A. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.**

---

<sup>5</sup> Hidayatullah, *Wawancara*, Tanggal 05 Oktober 2010

Kontribusi adalah sumbangan, keikutsertaan, iuran, atau sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Dinas pendapatan daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya berada sepenuhnya dan bertanggung jawab kepada daerah untuk itu kepada dinas pendapatan daerah dituntut agar melaksanakan tugasnya dalam penerimaan pajak burung walet. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan usaha agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan penugasan tersebut Dipenda Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui pemberian informasi, penyuluhan serta pemberian sanksi bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak namun dalam pelaksanaannya kurang berjalan sebagai mestinya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan, buk juliana adalah seorang karyawan Dinas Pendapatan Daerah bagian pajak daerah dan retribusi daerah mengatakan bahwasannya pajak burung walet dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu diantara jenis pajak daerah yang sangat besar yaitu pajak sarang burung walet. Dikarenakan perkembangan walet di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat begitu banyak. Dan dapat menguntungkan buat daerah. dilihat harga nilai jualnya sarang burung walet sangat mahal. Sehingga memberikan hasil bagi daerah untuk pembangunan daerah.<sup>6</sup>

**Tabel IV. 12**

**Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Tahun	Penerimaan pajak	Pendapatan Asli Daerah
----	-------	------------------	------------------------

---

<sup>6</sup> Juliana, *Wawancara*, Tanggal 09 September 2010

		(Rp)	(Rp)
1	2009	369.080.000	82.715.000.000
2	2010	137.000.000.000	571.200.000.000

*Sumber Data: Dipenda Kabupaten Kepulauan Meranti 2010*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi dari berbagai jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang meningkat setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2009 kontribusi pajak daerah sebesar 369.080.000 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 82.715.000.000, kemudian pada tahun 2010 mengalami kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar 137.000.000.000 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 571.200.000.000.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa salah satu jenis pajak daerah bagi Kabupaten Kepulauan Meranti yang dimaksudkan sebagai sumber pemasukan daerah adalah”pajak burung walet” Selain itu juga pajak burung walet merupakan jenis pajak daerah yang menghasilkan pajak terbesar, karena bisa memberi peningkatan kepada daerah.

Jumlah Wajib pajak Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2009-2010 adalah 382 penangkar walet wajib pajak yang terealisasi 332 penangkar walet.<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PAD**

Apabila diperlihatkan secara seksama perjalanan dimasa Rasulullah Saw, sebenarnya praktek perpajakan pernah wujud dalam realitas historis. Hanya saja tidak digalakkannya sistem

---

<sup>7</sup> Sutardi, *Wawancara*, 15 September 2010

perpajakan diperiode Nabi Saw karena masyarakat Islam pada masa itu sudah merasa cukup dengan sumber pendanaan yang ada seperti zakat, sedekah, ghanimah, dan lain-lain.

Akan tetapi, pada era berikutnya negara Islam semakin berkembang dan pada masa pemerintah Umar bin Khatab dibentuk program pembangunan, dimana pembiayaan untuk negara bisa ditutupi dengan sumber dana yang ada, akan tetapi dibutuhkan sumber dana yang lain, seperti pajak.

Di masa pemerintah Khalifah Umar bin Khatab, nimiah pembaharuan dalam administrasi dan pemerintah mulai dikembangkan, termasuk bidang perpajakan juga mendapat perhatian pula dari Amirul Mukminin.<sup>8</sup>

Dalam praktek yang ditemui pada episode sejarah Islam, cukup banyak jenis pajak yang pernah eksis, beberapa jenis pajak diantaranya:

1. Pajak harta kekayaan yang penetapan kewajibannya langsung oleh syar'i yaitu zakat.

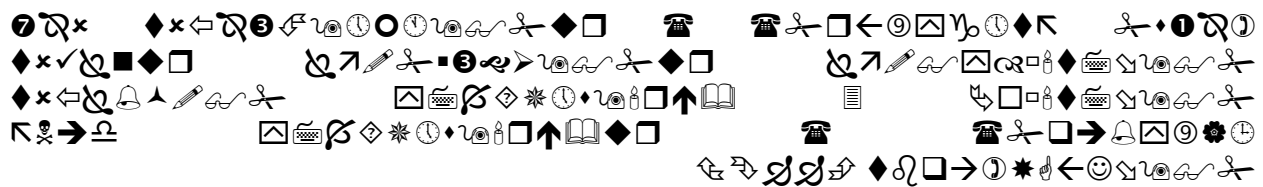
Hal ini hanya dikenakan kepada orang-orang Islam.

2. Jiziyah, yaitu pajak kepala yang dikenakan terhadap non Muslim kepada pemerintah Islam. Ini merupakan perimbangan kewajiban antara mereka dengan warga negara yang beragama Islam yang wajib membayar zakat. Jizyah ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan kosekuwensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan. Apabila mereka (non Muslim) tidak mampu membayar mereka mendapat dispensasi terbebas dari kewajiban tersebut. Dan bahkan yang tidak mampu berhak mendapat tunjangan negara. Jizyah bukan dilandasi oleh keinginan islam untuk menguasai harta al-Zimmi, tetapi jizyah adalah bagian dari bentuk dakwah Islam yang

---

<sup>8</sup> Helmi Karim, *Pajak Dalam Islam dan Kemungkinan Pengembangannya Sebagai Sumber Keu Negara*, (Orasi Ilmiah pada Dinas Talis XXV IAIN Susqa, 1995), h. 7

<sup>9</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet. Ke-1, h. 271



Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah Ayat: 177).

Dalam kalimat (... dan memberikan harta yang dicintainya...) menurut para ulama telah disepakat, jika kaum muslim walaupun sudah menunaikan zakat memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.<sup>10</sup>

Secara umum, masa pemerintah Al-Khulafa Ar Rasyidin adalah masa keadilan yang sangat diwarnai oleh sikap toleran, bersikap keras dalam memungut pajak.<sup>11</sup>

Sedangkan Abu Yusuf dalam kitabnya tentang pajak menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemungut pajak adalah seorang faqih, berilmu, bermusyawarah dan para ahli berakhlak baik (pandai menjaga kehormatan diri) yang tidak takut dicaci karena menjalankan perintah Allah, dan tidak takut menghadapi tindakan orang dzalim saat hukum Allah diterapkan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: gema Insani, 2002), Cet. Ke-1, h. 62

<sup>11</sup> Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), Cet. Ke-1, h. 335.

<sup>12</sup> Ibid.

Dalam Islam pemungutan pajak diperbolehkan asal kan diantara keduanya tidak saling merasa merugikan antara satu dengan yang lainnya. Prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur yaitu :

1. Harus ada nash (al-quran dan al-hadits) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non-muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemashalatan umum.

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (Mua'malah), oleh karena itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum Muslim). Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti-hak milik penuh).<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak walet Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai empat prinsip yang diterapkan menurut Ekonomi Islam:

1. Keadilan

Dalam pemungutan pajak hendaklah melakukannya secara adil agar tidak terjadi penipuan dan kecurangan bagi pihak subjek dan objek pajak. Prinsip keadilan harus sesuai dengan aturan Islam.

2. Kepastian

Subjek pajak tentang kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti, tak ada keraguan sedikitpun, sebab ketidak pastian dalam sistem pajak apapun sangat membahayakan

---

<sup>13</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007. h. 33.



bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak. Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak.

### 3. Kelayakan

Menjaga perasaan wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka sehingga dengan sukarela wajib pajak akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik.

### 4. Faktor Ekonomis

Ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai pemborosan. Jangan sampai bagian besar dari pajak yang terkumpul hanya habis terserap oleh petugas.

Apabila suatu usaha, instansi atau lembaga akan berjalan dengan lancar atau secara efektif. Maka terapkan prinsip yang sesuai dengan Syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Tujuan tersebut untuk mencapai suatu target yang akan dicapai.

Jadi, pemungutan pajak walet yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti dilihat dari petugas pemungutannya sudah efektif dalam melakukan tugasnya dan tidak terlepas dari Al-Quran dan Hadits. akan tetapi kurangnya ketegasan dalam pemungutan pajak walet. Sehingga wajib pajak hanya semena-mena tidak membayar pajak.

Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya pajak, maka pemerintahan pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu juga akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jika ada perilaku korupsi dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi yang melakukannya dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa di akhirat kelak.

Kalau menurut Ekonomi Islam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah menerapkan prinsip Ekonomi Islam. Prinsip ini akan diterapkan kepada masyarakat supaya suatu target akan tercapai.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sopian, *Wawancara*, Tanggal 07 Oktober 2010

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan pemungutan pajak sarang walet di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pihak Dipenda Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang didasarkan atas sistematika, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan sehingga terjalin kerjasama yang baik melalui sektor penerima pajak.

1. Melakukan bimbingan pembinaan terhadap wajib pajak burung walet
  2. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak burung walet
  3. Melakukan pembukuan dan pelaporan hasil pembuatan pajak burung walet
  4. Melakukan pengawasan terhadap penagihan pajak burung walet
  5. Melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah
- b. Kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwasannya pajak sarang burung sangat berpotensi bagi daerah dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peranan pajak walet di meranti dapat ikut serta dalam pembangunan daerah. Dari hasil penerimaan pajak bisa meningkatkan kualitas suatu daerah akan berkembang lebih optimal.

- c. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi pajak sarang burung walet yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam upaya peningkatan penerimaan PAD. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri, terhadap peningkatan pembayaran pajak sarang burung walet relevan dengan anjuran agama Islam sesuai dengan kaedah” apapun usaha yang dihalalkan boleh dilakukan”.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan pembahasan dari uraian pada bab sebelumnya mengenai kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti penulis memberi saran:

- a. Perlunya pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha sarang burung walet tersebut secara rutin dengan meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang budidaya sarang burung walet atau dalam pengawasan ada tim ahli sarang burung walet.
- b. Ditegakkannya peraturan daerah tentang sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang membayar pada melebihi jatuh tempo.
- c. Memberikan penyuluhan secara berkala terhadap masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak agar masyarakat sadar akan hal tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan wajib pajak dapat sadar akan pentingnya pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani P.A.J., *Pajak dan Perpajakan*, Jakarta: Fresco, 1994
- Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatun*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Amachi Zandjani Tubagus Chairil, *Perpajakan*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Gramedia Utama, 1992
- Devano Sony, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Kencan Prenada Media Group, 2006
- Didin Harifdhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren*, Jakarta: Gema Insani, 2002, Cet Ke-1
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007
- Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakatra: Kalam Mulia, 1991, Cet Ke-1
- Helman Karim, *pajak dalam Islam dan Kemungkinan Pengembangannya Sebagai Sumber Keuangan Negara*, Ormasi Ilmiah pada Dinas Talis xxv IAIN Susqa, 1995
- Inayah Gazi, *Teori konferhensif tentang zakat dan pajak*, Yogyakarta: Tiara wacana, 2003
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Bulak Sumur, 2003
- Nugroho K. Hary, *Panduan Lengkap Walet*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2010
- Nurmantu Safri, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2003
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 07 Tahun 2006 *tentang Retribusi Pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2002 *tentang Pajak sarang burung walet*
- Siahaan P. Marohot, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005
- Soemitro Rocmat, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Andi offset, 2008
- Sutardi, *Wawancara*, Tanggal 02 Juli 2010

Soemitro Rahmat, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta, Grafindo, 2003.

Soemitra Rahmat, *Azas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: PT. Eresco, 1997

Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, Cet Ke-1

Sudarsono, *Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak*, Jakarta: PT. Rineca Cipta, 1994

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Pendapatan Asli Daerah*

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2007

Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2002

Zein Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah dan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010 .....	14
Tabel 2. Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga (RT), dan Rumah Tangga Miskin(RTM) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010 .....	15
Tabel 3. Kondisi Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti 2010 .....	16
Tabel 4. Perkembangan Harga Sarang Burung Walet.....	21
Tabel 5. Daftar Nama-nama Pengusaha Walet yang telah mendapat izin dari Bupati .....	21
Tabel 6. Jumlah Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	29
Tabel 7. Keadaan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pendapatan Kepulauan Meranti .....	30
Tabel 8. Daftar Harga Sarang Burung Walet/kg Kabupaten Kepulauan Meranti .....	67
Tabel 9. Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kepulauan Meranti .....	71
Tabel10. Kontribusi Penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	74

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti ..... 25



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Jelaskan sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Jelaskan struktur organisasi beserta uraian jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Jelaskan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
4. Berapa jumlah karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
5. Berapa jumlah pengusaha walet di daerah Meranti?
6. Berapa persen penghasilan pajak sarang burung walet setiap tahunnya?
7. Berapa jumlah pengusaha walet yang telah dan yang belum mendapat izin dari pemerintahan daerah?
8. Apakah peraturan daerah pajak sarang burung walet telah diterapkan di Kabupaten Kepulauan Meranti?
9. Berapa target pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan pendapatan daerah?
10. Apakah sudah sepenuhnya pengusaha walet membayar pajak?jelaskan alasannya!

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hafshah Muhardiana di lahirkan pada tanggal 05 september 1987 di Selatpanjang, merupakan anak ke-3 (tiga) dari 7 (tujuh) bersaudara buah hati dari pasangan berbahagia Ayahanda Ali Basri dan Ibunda Sudarwati. Pada tahun 1994 penulis memulai Pendidikan Dasar di SDN 009 Selatpanjang. Setelah tamat dari Sekolah Dasar pada tahun 2000, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Selatpanjang. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2003, penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Selatpanjang. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syari'ah Strata Satu (S1). Pada bulan Februari sampai Maret 2009 penulis melakukan magang di BRI Taluk Kuantan setelah magang penulis mengajukan usulan penelitian skripsi dengan judul “**Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Di Tinjau Dari Ekonomi Islam**”. Di bawah bimbingan Bapak Amrul Muzan, MA berdasarkan hasil Ujian Sarjana Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum pada tanggal 25 April 2011 penulis dinyatakan “**LULUS**” dengan predikat “**MEMUASKAN**” dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,12 dan menyandang gelar Sarjana.